

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI MENURUT  
KEPUTUSAN PRESIDEN NO.174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI KEPADA  
NARAPIDANA KORUPSI**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

**Ayuni Antenar**

**NPM. 1521020013**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019 M**

## ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Istilah remisi di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pengampunan hukuman (syafa'at). Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Pemberian syafa'at yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Hal tersebut tercermin di dalam KEPPRES No.174 Tahun 1999 tentang remisi.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana pemberian remisi bagi narapidana Korupsi berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN No.174 Tahun 1999 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberian remisi bagi narapidana Korupsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah dan majalah, Koran serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya. Penelitian ini bersumber dari data primer dan diperoleh melalui Al-Quran, Hadist dan KEPPRES No.174 Tahun 1999, sedangkan data sekunder diperoleh dengan artikel-artikel dan makalah-makalah. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana tentang remisi yang merupakan pengampunan berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana korupsi telah dianggap memenuhi ketentuan-ketentuan syarat menurut KEPPRES No.174 Tahun 1999 yaitu terpidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara. Menurut fiqh siyasah pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak masalah jika sesuai dengan aturan dan HAM. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat didalam Al-Quran dan Hadist, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat. Syafa'at hanya berlaku dalam jarimah ta'zir, korupsi termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadist.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

**: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN  
REMISI MENURUT KEPPRES NO 174 TAHUN 1999  
KEPADA NARAPIDANA KORUPSI**

**Nama**

**: Ayuni Antenar**

**Npm**

**: 1521020013**

**Jurusan**

**: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas**

**: Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunagosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Mohi Mukri, M.Ag**

**NIP. 195904161987031002**

**Rohmat, S.Ag., M.HI.**

**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
PEMBERIAN REMISI MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO 174  
TAHUN 1999 TENTANG REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI.**

disusun oleh: **AYUNI ANTENAR, NPM: 1521020013, Jurusan: Hukum Tata  
Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di  
Fakultas Syar'iah pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 Desember 2019**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Susiadi AS., M., Sos.I**

**Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I**

**Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji Pendamping 1 : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**

**Penguji Pendamping 2 : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. H. Khoirudin, M.H.  
NIP. 196210211993031002**



## MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>١</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

(Q.S Al Maidah: 45)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 48.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Motivator terbesar dalam hidupku yang kusayangi dan kucintai yaitu kedua orang tuaku Ayahanda Dan Ibunda tercinta Idham Cholid dan Rokyah yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
3. Adikku Tersayang Dwi Hartina dan Anggun Lestari Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-Saudaraku Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Mencapai Keberhasilanku.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ayuni Antenar, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 19 Juni 1997, anak pertama dari pasangan Idhan Cholid dan Rokyah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) PG Bunga Mayang dan selesai pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Negara Tulang Bawang selesai tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) PG Bunga Mayang selesai tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kotabumi selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di organisasi ekstra kampus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Yang Membuat

Ayuni Antenar

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keppres No 174 Tahun 1999 kepada Narapidana Korupsi”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, amin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri .M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. KH. Khoirudin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa



5. H. Rohmat, S.Ag., M.HI Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung
8. Kakak Asuh Windu Fitria S.H., yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasa Angkatan 2015, yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesaikannya skripsi
10. Keluarga besar KKN 23 Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik selama KKN.
11. Sahabat-sahabatku Weni Rahma S. H., Mega Lailatul Hikmah Amalia S.H., Sheila Pertiwi Kumalarati, Visca Ayuni, A. Chandra Dwi Hasta, Adjie Arvindo, dan Selvy Damayanti S.Pd.
12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segera keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Penulis, Bandar Lampung 2019

Ayuni Antenar  
1521020013





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BABI PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	11
B. Siyasah Dusturiyah.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Islam.....	22
D. Remisi dalam Pandangan Islam.....	32
E. Tinjauan Pustaka.....	39

### **BAB III REMISI MENURUT KEPRES NO.174 TAHUN 1999 KEPADA NARAPIDANA KORUPSI**

A. Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Korupsi .....	40
1. Bentuk-Bentuk Remisi.....	47
2. Tujuan Pemberian Remisi.....	60
B. Substansi KEPRES No. 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi.....	62
1. Hal yang Mendasari Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi.....	62

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi yang diatur dalam KEPRES No.174 Tahun 1999 .....	79
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPRES No.174 Tahun 1999 .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPRES No.174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. **Tinjauan Fiqh Siyasah** Penelitian ini akan di analisis atau ditinjau dari ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>
2. **Pemberian** merupakan proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan: pemberian ampun.
3. **Remisi** adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2011. h, 1470

4. **KEPRES No.174 Tahun 1999** Kepada Narapidana Korupsi Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian Remisi, disana hanya dikatakan: “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani Pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>2</sup>

Dari beberapa penjelasan istilah diatas, dapat lah penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud Judul Proposal ini adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana menurut KEPRES No. 174 tahun 1999.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPRES No.174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Alasan objektif**

Korupsi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi terjadi karena kurang kuatnya moral seseorang, karena moral merupakan pondasi awal seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, semakin

---

<sup>2</sup>Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Pasal 1



lemah moral maka semakin mudah pula untuk tergiur dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Di Indonesia narapidana korupsi akan dijatuhkan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan kategori yang ditentukan. Akan tetapi dari sanksi tersebut narapidana korupsi berhak untuk mendapatkan remisi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, tentang Pemberian Remisi menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi kepada Narapidana Korupsi.

## 2. Alasan subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini didalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas.
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Apabila mengacu pada ayat tersebut maka kegiatan perekonomian mesti diselenggarakan secara demokratis, kerjasama, dan solidaritas, sehingga tidak memungkinkan ada segelintir tangan yang

mengakumulasi kemakmuran. Akan tetapi lain halnya yang terjadi, banyak oknum-oknum yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut dengan cara korupsi.

Korupsi adalah extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa), dan penanganannya pun harus extra ordinary enforcement, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik. Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi satu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>3</sup>

Korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah saw. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. Misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw. ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut ghanimah (harta rampasan perang).<sup>4</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya dasar perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan

---

<sup>3</sup>Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 21

<sup>4</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 155.

korupsi dalam islam meliputi Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161 disebutkan:<sup>5</sup>

بَتَّ مَا نَفْسٍ كُلُّ تُوَفِّي ثُمَّ الْقِيَمَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِي غُلًّا وَمَنْ يَغُلَّ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَ (البقرة : ١٦١)

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>6</sup>

Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berubah menjadi sistem dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadikan narapidana menyadari kesalahannya untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut pemerintah mengatur hak-hak narapidana salah satunya remisi. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan hukuman (remisi).

Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 171.

<sup>6</sup>*Ibid.*



adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.<sup>7</sup> selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.<sup>8</sup>

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu syafa'at (pertolongan).<sup>9</sup>

Remisi diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 945.

<sup>8</sup>Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipt, 1992. h.402.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah"*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006. h..419.

kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Ayat al-quran yang berkaitan dengan latar belakang diatas adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 :<sup>11</sup>

أَلَمْ يَنْفَرِ قَلِيلٌ مِّنْكُمْ لِيَأْكُلُوا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَيَتَوَدَّعُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ (البقرة : ١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (QS. Surat Al-Baqarah ayat 188)<sup>12</sup>

Kesimpulan dari ayat diatas: Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, ghibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat dihadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tak benar atau dengan memberi sogokan yang keji.

#### D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah bagaimana norma-norma atau aturanyang terdapat didalamKEPRES No. 174 tahun 1999 tentang Pemberian Remisi kepadaNarapidana Korupsi dan akan melihat dari sisi siyasah dusturiyah

<sup>10</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>11</sup>AL-Quran dan Terjemahnya Departemen RI, (Jakarta Bumi Restu, 1976) h. 29

<sup>12</sup>*Ibid.*

(Peraturan Perundang-undangan) dan memahami bagaimana prosedur pengajuan remisi diatur dalam KEPRES No. 174 Tahun 1999 dan Perundang-undangan.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

#### **G. Signifikan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai Pemberian Remisi menurut kepada Narapidana Korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya



- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah dan majalah, Koran serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama fiqh siyasah dan KEPRES No.174 Tahun 1999.
- b. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan membaca buku atau literature yang relevan dengan topic masalah dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat diamati. Dalam analisis kualitatif ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014), h.31

<sup>15</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari 2 kata bahasa Arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>16</sup>

Sedangkan, kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

*Fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan namasiyâsah syar'iyah<sup>17</sup> secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam al-Bujairimî: "Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan".<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Riasa Grafindo, 1997), h. 21.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>18</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda media, 2003), h. 2



- b. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait: "Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka".<sup>19</sup>
- c. Menurut Imam Ibn 'Abidin: "Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan".<sup>20</sup>
- d. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad): *siyasah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian *fiqh siyasah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.<sup>21</sup>
- e. Menurut Abd Wahab al-Khallaf: *fiqh siyasah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan

---

<sup>19</sup> Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad (Mizan, 1989), h. 44

<sup>20</sup> *Ibid*, h.46.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.49.

(bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.

Maksud Abd Wahab tentang masalah umum negara antara lain adalah ;

- 1) Pengaturan perundangan-undangan negara.
  - 2) Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan.
  - 3) Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan
  - 4) Urusan dalam dan luar negeri.<sup>22</sup>
- f. Menurut Abd al-Rahman Taj; *fiqh siyasah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>23</sup>
- g. Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna kontekstual ayat 58 dan 59 surat an-Nissa, tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam format siyasah. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer

---

<sup>22</sup> Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut. Hal.192

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.5-6

maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk negara kita adalah; Penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias politika) dan rakyat atau warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara penguasan dengan rakyatnya.<sup>24</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqhsiyâsah*.<sup>25</sup> Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqhsiyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqhsiyâsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah*;
- b. *Siyâsah Mâliyyah*;
- c. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*;
- d. *Siyâsah Harbiyyah*;
- e. *Siyâsah `Idâriyyah*;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.12

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.4.



Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyâsah Qadlâ'iyyah*;
- b. *Siyâsah 'Idâriyyah*;
- c. *Siyâsah Mâliyyah*;
- d. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*.<sup>26</sup>

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyâsah Qadlâ'iyyah*;
- b. *Siyâsah Dauliyyah*;
- c. *Siyâsah Mâliyyah*.<sup>27</sup>

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
- c. *Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *at-Ta'liq ala Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyyah li Syaikh al-Islam Ibni Taiyimah*, Ter. Ajmal Arif, *Politik Islam: Ta'liq siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015)

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.12

- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>28</sup>

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok:

*Pertama:* politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>29</sup>

*Kedua:* politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.14-16

<sup>29</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004,) h.27

*Ketiga: politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.*

## **B. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>30</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hlm. 177

<sup>31</sup>Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47

Siyasah dusturiyah yang merupakan kontribusi Islam dalam sistem politik mempunyai prinsip penting mengenai pembentukan pengaturan perundang-undangan. antara lain, mengacu pada prinsip nash dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, prinsip nash yang ditegaskan oleh munawir sjadzali dalam karyanya “Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, mencakup:

1. Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi;
2. Musyawarah;
3. Ketaatan kepada pemimpin
4. Keadilan;
5. Persamaan, dan
6. Hubungan baik antar ummat beragama.<sup>32</sup>

Sedangkan prinsip Jalb al-mashalih wa Dar al-mafasid menurut Muhammad Iqbal dalam karyanya “Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, tentu perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang di undangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.<sup>33</sup>

Hal ini terangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa prinsip islam yang diletakkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan ialah

---

<sup>32</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.4.



tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law).<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip tersebut telah benar menjadi rujukan di negara-negara Islam, namun tidak menutup kemungkinan negara-negara Islam juga mengambil (mengadopsi) sumber lain sebagai sumber hukum negaranya. Seperti contoh yang dijelaskan oleh Munawir Sjadzali bahwa negara Maroko dan Yordania menganut prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi terkait bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan pewakafan, fiqh Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber lain, termasuk barat.

Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diterbitkan melalui UU No 12 Tahun 2011, yang mempunyai asas meliputi:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;
2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan
3. Asas lain sesuai bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Prinsip siyasah dusturiyah jika digali melalui Regulasi peraturan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sama sekali tidak ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Justru dalam kaitannya jika di pahami secara mendalam malah terlihat sangat kompatibel dengan Prinsip-prinsip Islam, baik itu prinsip nash maupun prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid.

---

<sup>34</sup> Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 1993 (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h.68

Tinggal lagi bagaimana pelaksana kebijakan (governance) tersebut membuat kebijakan (publik policy) sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. karena ujung tombak kesalahan ialah pada sikap dan perilaku manusia itu sendiri (itself). Betapapun Islamnya regulasi tersebut, jika penegak hukum hanya menjadikannya sebagai alat untuk mendzalimi orang lain, maka tetap saja regulasi tersebut menjadi pajangan biasa.

Dasar hukum siyasah dusturiyah :

1. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>35</sup>

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

فَرِيقًا تَأْكُلُ أَمْوَالَ الْغَنَىٰ بِهَٰؤُلَاءِ بَاطِلٌ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنْسَانِ أَمْوَالٍ مِّنَ (البقرة : ١٨٨)

<sup>35</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>36</sup>

2. Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.
3. Dalam hukum Islam, *ijma*'' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta, maka *ijma*'' tersebut dinyatakan batal.<sup>37</sup>
4. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan

---

<sup>36</sup> Al-Quran dan Terjemahnya Departemen RI, (Jakarta BumiRestu, 1976)

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Jilid II, Damsyiq: Dar al Fikr, 2005 h.574

hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas Biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

### C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>39</sup>

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantar kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 29

---

<sup>38</sup> *Ibid* h.581

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 71.

<sup>40</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008). H.77



جِرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَر (النساء : ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>41</sup>

Dalam hukum pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah *jarimah*, utamanya di antara yang telah diperkenalkan kepada publik, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Ada kemungkinan menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik *jarimah* ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.<sup>42</sup>

Mengacu kepada beberapa istilah dalam Islam diatas korupsi mempunyai makna luas yaitu mencakup segala bentuk manipulasi, pemerasan, kecurangan, pencurian dan nepotisme, dan tak terbatas pada kerugian negara saja bahkan korupsi dipandang sebagai perbuatan terkutuk karena dampak buruk yang ditimbulkannya suatu masyarakat dan bangsa sangatlah serius. Ibarat suatu penyakit, korupsi dianggap suatu penyakit menular atau bahaya laten yang bisa menyebar luas ke seluruh sistem tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam lingkup birokrasi dan pemerintahan. Dengan segala bentuk dan modus yang

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 195.

<sup>42</sup>Moh Khasan., *Reformasi Teori Hukuman Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian Individual)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011.

berbeda-beda, tidak ada satupun negara didunia ini yang dapat melepaskan diri sepenuhnya dari korupsi termasuk Indonesia cenderung semakin meningkat dan modus yang semakin beragam dari tahun ke tahun.

Dalam khazanah pemikiran Islam kajian korupsi tampaknya belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Kalangan *fuqah* berbicara tentang korupsi disandarkan kepada perilaku kejahatan memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak benar (*akl amwal al-nas bi al bathil*), seperti yang diharamkan dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Paling tidak ada lima istilah dalam Islam yang cukup dekat maknanya dengan korupsi, yaitu penggelapan (*ghulul*), penyuapan (*risywah*), merampas harta orang lain dengan cara paksa (*ghasab*), mencuri harta milik orang lain (*sariqah*) dan mengacau keamanan di masyarakat atau negara (*hirabah*).<sup>43</sup>

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap *jarimah* korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa *jarimah* yang secara substansial dapat dijadikan landasan untuk merumuskan *jarimah* ini dengan pendekatan fiqh antara lain:<sup>44</sup>

#### 1. *Ghulul* (Penggelapan)

Menggelapkan uang negara dalam sistematika Syari'ah Islam disebut dengan *al-ghulul*, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ketempat pembagian, walaupun yang diambilnya

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011) h.35

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 68.

seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*. Hadiah untuk para pejabat juga disebut dengan *ghulul*.<sup>45</sup>

Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia korupsi termasuk di dalam *ghulul*. Dimana korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.<sup>46</sup>

Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161:<sup>47</sup>

أَنفَسٍ كُلُّ تُوَفِّي ثُمَّ الْقِيَمَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِي غُلًّا وَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ (الإمran : ١٦١).

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>48</sup>

Dalam perspektif lain *ghulul* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Di antara bentuk perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi atau apapun namanya yang tidak halal dan

<sup>45</sup> Abu Fida' Abdur, Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006 h.30

<sup>46</sup> *Ibid* h.35

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 198.

<sup>48</sup> *Ibid*.

tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra:

من استعملنا على عمل فرز قناهرز قافما أخذ بعد ذلك فهو غلول

*“Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul.” (HR. Abu Daud).<sup>49</sup>*

Sanksi hukum pada *ghulul* bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarima ridda. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal ini yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah *qisas* dan hudud, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.<sup>50</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa istilah *ghulul* diambil dari Surat Ali Imran ayat 161 yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam kasus *ghulul* pada zaman Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat. Sehingga dalam suatu kasus Nabi tidak berkenan menyalati jenazah pelaku *ghulul*. Bahkan secara tegas Rasulullah bersabda bahwa sedekah para koruptor dari hasil

<sup>49</sup> Moh Khasan., *Reformasi Teori Hukum Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011, h.70.

<sup>50</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 88.



korupsinya tidak akan diterima Allah seperti ditolaknya ibadah shalat tanpa wudhu.<sup>51</sup>

Oleh karena itu berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah yang termasuk *ghulul* adalah:

- a. Mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang).
- b. Menggelapkan khas negara (baitul maal).
- c. Menggelapkan zakat.
- d. Hadiah untuk para pejabat.

## 2. *Risywah* (Penyuapan)

Ditinjau dari segi bahasa, *risywah* adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi ini dapat diambil dari asal kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur.<sup>52</sup>

Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisy* adalah duta atau mediator antara penyuap dengan penerima suap, sedangkan *al murtasyi* adalah penerima suap.<sup>53</sup>

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan *risywah* adalah memberikan harta kepada seorang sebagai kompensasi

---

<sup>51</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h.105.

<sup>52</sup> Abu Fida" Abdur, Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006, h. 3.

<sup>53</sup>*Ibid.*

pelaksanaan tugas atau kewajiban yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu uang imbalan atau tip.<sup>54</sup>

Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia *risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.<sup>55</sup>

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasy*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>55</sup> Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah Kepada Pejabat, h. 368.

<sup>56</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 88.

bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (Al-Qur'an dan hadis), mengingat sanksi hukum pelaku *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.<sup>57</sup>

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, disebutkan dengan pernyataan disebutkan dengan pernyataan لعن الله الراشيء والمرتشى (Allah melaknat penyuap dan penerima suap). Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* menyatakan terlaknat dan terkutuk, hal ini dikategorikan dalam daftar dosa-dosa besar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *risywah* merupakan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat. Dimana salah satu pihak yang terlibat *risywah* adalah orang yang diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi *risywah* yang dilakukan mengakibatkan kerugian masyarakat, dan telah menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat.

### 3. *Ghasab* (mengambil hak/harta orang lain)

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja يغصب-غصب yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim, sedangkan secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 103.

untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan / terang-terangan.<sup>58</sup>

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mendefinisikan *ghasab* secara etimologis lebih lengkap dari definisi diatas yaitu *ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.<sup>59</sup>

Adapun larangan melakukan *ghasab* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:<sup>60</sup>

1) Surat An-Nissa ayat 29

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجَرَّةٍ (النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nissa: 29)<sup>61</sup>

Sanksi hukum bagi pelaku *ghasab* tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana *ghasab*, ada sanksi tertentu apabila dihubungkan dengan kategorisasi

<sup>58</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h.124.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 211.

<sup>61</sup> *Ibid.*

hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *ghasab* masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.<sup>62</sup>

#### 4. *Khianat*

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila di beri amanah berkhianat.<sup>63</sup>

Khianat merupakan sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan. Khianat menurut al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* adalah orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut.<sup>64</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu yang (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.<sup>65</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 37:

---

<sup>62</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 109.

<sup>63</sup> Moh Khasan., *Reformasi Teori Hukuman Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian Individual)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011, h. 77.

<sup>64</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 111..

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 112.



أَفَايْرُكُمْهُ رُبْعُ عَلَى بَعْضِهِ وَالْخَبِيثَ وَتَجْعَلُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ اللَّهُ لِيَمِيزَ  
الْخَسِرُونَ هُمْ أُولَئِكَ جَهَنَّمَ فِي فَيَجْعَلُهُ رَجْمِي (الأنفال: ٣٧)

Artinya: Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Sanksi jarimah khianat tidak disebutkan secara eksplisit, jelas dan konkrit. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan qisas/diyat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa khianat adalah perbuatan yang yang tercela, dimana khianat merupakan sikap yang tidak memenuhi janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### D. Remisi dalam Pandangan Islam

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *syafa'at* (pertolongan), Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu* “menggiring” atau

memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau lebihnya.<sup>66</sup>

Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Hukuman penjara sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, Ibnu Qayyim berkata “ penjara secara syara’ bukanlah tahanan ditempat yang sempit, melainkan tahanan untuk merintangi dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik dirumah, dimasjid, atau berada dikekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia memaknai penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

*Syafa'at* (Remisi) hanya berlaku dalam jarimah Ta'zir, sebab jarimah Qishas dan Hudud, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Korupsi termasuk kedalam jarimah Ta'zir, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil *Syafa'at* dalam jarimah ta'zir terdapat di Q.S An-Nissa 16:

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqih Sunah", Jakarta : Pena Pundi Aksara.2006.h.419

نَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَاتَا بَأْفَابٍ فَآذُوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيَنِيهَا وَالَّذَانِ  
رَحِيمًا تَوَّابًا كَا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Menurut Imam hanafi dan Maliki, *ta'zir* hukumnya wajib jika ada keyakinan yang kuat dari pemberi hukuman *ta'zir* bahwa si pelaku *jarimah* tidak akan berubah kecuali ia diberi sanksi hukuman *ta'zir*. Karena hukuman *ta'zir* tersebut merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hukum Allah SWT dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut hanafiyah juga hukum *ta'zir* wajib apabila berkaitan dengan hak alami. Tidak adapemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, “apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenang dan iatidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”.

Istilah remisi di dalam Islam dikenal dengan istilah pengampunan hukuman (*syafa'at*). Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Kemudian arti itu berkembang lagi menjadi "Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongan, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain."<sup>67</sup>

*Syafa'at* yang sangat tepat diterapkan dalam lapangan kepidanaan Islam, yaitu yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, yaitu:

"Suatu permintaan dari seorang makhluk yang pernah melakukan suatu kejahatan, supaya dibebaskan dari segala dosa yang pernah dilakukannya"<sup>68</sup>

Secara terminologi *syafa'at* adalah meminta bantuan kepada orang lain. Jika apa yang diharapkan seseorang terdapat pada pihak lain. Yang ditakuti atau disegani, maka ia dapat menuju kepadanya dengan mengedepankan dirinya dengan orang lain menghadap yang dituju itu untuk bersama-sama memohon yang ditakuti dan disegani itu. Orang yang dituju itulah yang mengaju permohonan. Dia menjadi penghubung untuk meraih apa yang diharapkan itu.

*Syafa'at* Nabi pada hakikatnya adalah doa dan munajat beliau pada Allah SWT, karena kedekatan dan kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah. Maka Tuhan akan mengabulkan doa tersebut dan meliputi kasih

---

<sup>67</sup> Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007), h.306.

<sup>68</sup> Ali Ibn Muhammad, Al-Jurjani, *Al-Tarif*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H), cet. Ke-I, h. 142.

sayang-Nya kepada orang yang telah berbuat dosa, serta mengampuninya. Pada hakikatnya, *syafa'at* terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah SWT memberikan izin kepada segenapmakhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.<sup>69</sup>

Bila dikontekskan pada masa sekarang pengurangan hukuman sering kali disebut dengan kata remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman.

Berkelakuan baik itu merupakan interpretasi orang yang bertaubat karena orang yang bertaubat adalah orang yang menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah, sehingga ia bertaubat dan melakukan perbaikan atas perilakunya.

Ada tiga macam *Syafa'at* dalam Islam, yaitu:

Pertama, *syafa'at Takwiniyah*, berkaitan dengan kesaksian ilmiah filosofis tentang adanya sistem alam semesta yang ditegakkan atas dasar silsilah sebab akibat (Kausalitas), tidak berdiri sendiri pada dzatnya, tidak berdiri sendiri dalam illat (sebab) dan pengaruh yang dimilikinya.

Kedua, *syafa'at Qiyadiyyah*, (*syafa'at* berupa bimbingan), syafaat ini berupa kepemimpinan para nabi, para wali, para imam dan kitab suci yang berfungsi sebagai *syafa'at* untuk mencegah manusia masuk kedalam kemaksiatan dan azabnya.

---

<sup>69</sup> Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007. h.308,



Ketiga, *syafa'at Musthalahah*, adalah sampainya rahmat dan magfiroh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Magfiroh dan ampunan bisa diperoleh melalui jalan dan sebab-sebab.<sup>70</sup>

Dimana tujuan dan manfaat *syafa'at* adalah:

1. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) pelaku tindak pidana.
2. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

#### 1. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Untuk mengetahui dasar hukum remisi menurut hukum islam, maka haruslah merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Memang didalam al-Qur'an tidak akan kita jumpai kata remisi karena remisi bukan berasal dari bahasa Arab. Namun, meskipun kata remisi tidak ada didalam al-Qur'an tetapi unsur-unsur remisi tersebut ada didalam al-Qur'an. Allah SWT telah menyinggungnya dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 45, yang berbunyi ;

رَبِّ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسُ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا  
فَارَةً فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصُ وَالْجُرُوحِ بِالْسِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنُ  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ دَك

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 310.

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum diyat tersebut ditetapkan kepada mereka mereka Bani Isra'il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan al-Qur'an pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat terdahulu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.<sup>71</sup>

## 2. Contoh Kasus Korupsi beserta Pemberian Remisinya

a. Nama : Hutomo Mandala Putra

Kasus : Korupsi PT. Goro Batara Sakti (GBS) dan Bulog

Vonis : 15 Tahun

Ditahan : 2002

Remisi yang didapat pada tahun 2002 sebanyak 1 bulan remisi umum dan 1 bulan remisi khusus, tahun 2003 sebanyak 3 bulan

---

<sup>71</sup>M. Quraishi Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, (Jakarta:Lentera Hati, 2002),h. 107

remisi umum dan 1 bulan remisi khusus dan tahun 2004 sebanyak 7 bulan remisi khusus dan 1 bulan remisi khusus.<sup>72</sup>

b. Nama : Bob Hasan

Kasus : Korupsi Proyek PT. Mappindo Parama

Vonis : 6 Tahun

Ditahan : 2001

Remisi yang didapat pada tahun 2001 sebanyak 5 bulan 15 hari remisi umum, tahun 2002 sebanyak 3 bulan 15 hari remisi khusus dan tahun 2003 sebanyak 7 bulan 20 hari remisi umum.

c. Nama : Urip Tri Gunawan

Kasus : Suap Jaksa

Vonis : 20 Tahun

Ditahan : 2008

Remisi yang didapat pada tahun 2009 sebanyak 2 bulan remisi umum dan sebanyak 1 bulan remisi khusus, tahun 2010 sebanyak 3 bulan remisi umum dan sebanyak 1 bulan remisi khusus dan tahun 2011 sebanyak 4 bulan remisi umum.<sup>73</sup>

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai remisi. Untuk itu

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h. 133

<sup>73</sup>Muhammad Riski, "Kronologi Bebasnya Jaksa Urip persi Kemenkumham,"

penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Ahmad Fakhurrozi, 2017. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “ Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Remisi Bagi Narapidana Korupsi” Peneliti ini membandingkan antara dua yaituketentuan hukum pidana Indonesia tentang remisi dan ketentuan hukum pidana Islam tentang remisi. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia tentang remisi yang merupakan pengampunan berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999 yaitu terpidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Dalam ketentuan hukum Pidana Islam tentang remisi pelaku tindak pidana mengkatagorikan kepada *mashlahah mursalah* Karenaremisi ini dipandang baik oleh akal.<sup>74</sup>

Marie Muhammad, 2014. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makasar, “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam penelitiannya Marie Muhammad terfokus pada Pemberian Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain Kelengkapan berkas yaitu Vonis dari pengadilan dan Eksekusi dari Kejaksaan. Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam meberikan remisi.

---

<sup>74</sup> Ahmad Fakhurrozi, *Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Remisi bagi Narapidana Korupsi* Jakarta: 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Kamus

- Abu Fida" Abdur, Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.  
Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27
- Ali Ibn Muhammad, al-Jurjani, *Al-Tarifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H), cet. Ke-I.
- Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad (Mizan, 1989),
- Al-Quran dan Terjemahnya Departemen RI, (Jakarta Bumi Restu, 1976)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999)
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat.
- Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007)
- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010,
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonsia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga* (Jakarta)



Dwi djapriyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006)

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda media, 2003),

Julita Melisa, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lapas di Indonesia*,” Pdf 1320-2523-1-SM

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Riasa Grafindo, 1997)

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1,

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008

Moh. Khasan, *Reformasi Teori Hukum Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian Individual)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011, h. 58.

Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranada media Group, 2014).

Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. 1.

Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta, Pranada media Group. 2014.

Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008).

Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “*Fiqh Sunah*”, Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.

Sukarno Aburaeradkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 203

Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta :Rhineka Cipt, 1992.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suparni Ninik,  
*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syamsul Arif Indkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Cita Pustaka Media, 2014),

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012).

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Widya Puspa Rini Soewarno,  
*pdf Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: UI, 2012).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## B. Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No  
M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Pasal 1

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia  
Nomor : M.09.HN.02-01. Tahun 1999  
tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999  
tentang Remisi Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999  
tentang Remisi

Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan  
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02  
Tahun 2010 Pasal 6 s.d. 9

Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*,  
Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999*  
*Tentang Syarat dan Tata Cara*  
*Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

### C. Jurnal

Ahmadi Hasan. 2017.  
Remisi Terhadap Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum  
Islam. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. 17(2).

JSIKA. 2015.  
Rancangan Bangun Aplikasi Pemberian Usulan Remisi Narapidana Pada  
Rumah Tahanan Kelas IIB Bangil. *Jurnal Stikom*. 4(2).

Muhammad Ardi Pradana. 2018.  
Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan. *E-  
Jurnal Spirit Pro Patria*. 4(2).

Sri Wulandari. 2017.  
Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapi  
dana. *Jurnal Spektrum Hukum*. 14(1).

Umi Enggarsasi, Atet Sumanto. 2015.  
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di  
Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Perspektif*. 20(2).

### D. Skripsi

Ahmad Fakhrurozi, *Skripsi Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam  
dan Hukum Pidana Indonesia*  
*Tentang Remisi Bagi Narapidana Korupsi*, Jakarta: UIN  
Syarif Hidayatullah, 2017.

NurulRiskiKusumawati,  
*Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang*,  
Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Hilda AmaliaWidyastuti,  
*Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*,  
Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2013.

#### E. Internet

Andre Louis,  
“Yuridis Sosiologis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana”  
<http://www.scribd.com/mobile> (25 Oktober 2019)

AyuTari, “  
*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor*” <http://www.academia.edu> (27 Oktober 2019)

Dwi Sara, “Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan” <http://online-hukum.blogspot.com> (25 Oktober 2019)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Remisi> (diakses pada tanggal 4 maret 2019 pukul 20:27)